

maupun organisasi bisnis (perusahaan) juga akan dihadapkan pada berbagai *stakeholder* yang dapat mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan organisasi, seperti halnya pemerintah, media massa, konsumen loyal/pelanggan, pemodal/donatur, dan kelompok-kelompok lain. Untuk itu, selayaknya manajemen *stakeholder* juga dapat diterapkan oleh organisasi dakwah dalam mencapai tujuan dakwahnya. Dengan memajemen berbagai *stakeholder* dalam organisasi dakwah, maka kegiatan dakwah diharapkan akan dapat lebih *powerful*, lebih massif dan bergerak sinergis, sehingga target-target dari lembaga dakwah tersebut akan dapat lebih cepat tercapai.

Dalam proses memajemen *stakeholder*, tentunya tidak lepas dari aspek perumusan, implementasi, serta pengendalian/pengawasan *stakeholder* yang dilibatkan. Tanpa perumusan rencana yang matang, suatu proses manajemen akan sulit dipastikan gambarnya perealisasiannya, serta juga akan menyulitkan dalam proses kontrol, pengawasan serta evaluasi kinerjanya di lapangan. Pun demikian, adanya perencanaan yang matang, tanpa ada implementasi/pelaksanaan, hasilnya akan sia-sia dan perencanaan hanya akan menjadi cerita indah semata, tanpa sebuah realisasi, pergerakan, dan *action* di lapangan. Demikian halnya, tanpa ada pengendalian/pengawasan yang terencana, akan membuat kinerja implementasi di lapangan berjalan mengalir apa adanya, dan akan sulit dikendalikan, terutama ketika berhadapan dengan berbagai masalah-masalah teknis yang *unpredictable* (tidak terprediksi) di lapangan.

Salah satu tantangan besar dalam dakwah saat ini adalah masalah prostitusi. Prostitusi atau dalam bahasa latinnya disebut *pro-stitutere* atau dalam bahasa

penduduk di area terdampak, dinyatakan bahwa penutupan di lokalisasi spesifik dolly sebenarnya sudah ramai sejak tahun 1980-an oleh pemerintah saat itu, namun baru di tahun 2014 lokalisasi di Dolly bisa resmi ditutup oleh pemerintah²¹.

Praktek Prostitusi di Dolly yang telah berjalan sejak 1967 tersebut, mengalami keruntuhan setelah hampir setengah abad berdiri (47 tahun). Pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2014 secara resmi Dolly ditutup oleh pemerintah kota Surabaya dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Termasuk seluruh titik lokalisasi di Jawa Timur, yang terdapat 47 area lokalisasi di Jawa Timur telah dinyatakan ditutup total tepatnya pada 29 Mei 2016 oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, dengan pernyataan deklarasi Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menyatakan bahwa Propinsi Jawa timur telah bebas dari prostitusi.²² Di lapangan, organisasi dakwah yang selama ini terlibat aktif dalam mengkoordinasi penutupan lokalisasi prostitusi Dolly maupun berbagai lokalisasi prostitusi di Jawa Timur diwadahi oleh organisasi IDIAL-MUI Jatim.

Pasca lokalisasi Dolly dan berbagai lokalisasi se-Jawa Timur lainnya ditutup, IDIAL-MUI Jatim tidak berhenti begitu saja. IDIAL-MUI Jatim memiliki tujuan lanjutan, yakni bagaimana mengentaskan para eks-PSK dan mucikari serta warga terdampak, agar benar-benar dapat lepas dari lingkaran prostitusi yang selama ini dianggap sebagai sumber penghidupan utama. Untuk itu, tujuan dari program pasca penutupan lokalisasi adalah melakukan pengawasan dan

²¹ Hasnah, salah satu warga terdampak yang tinggal di gang putat Jaya C Timur no. 20, yang terletak 50 meter dari area lokalisasi Dolly, *wawancara*, Surabaya, (12 November 2016)

²² <http://www.realita.co/index.php?news=Deklarasi-Jawa-Timur-Bebas-Prostitusi-Digelar-di-Kota-Mojokerto>, lihat juga <http://www.terasJawaTimur.com/Jawa-Timur-bebas-prostitusi-eks-lokalisasi-balongcangkring-resmi-ditutup/>, lihat juga <http://www.news.detik.com/jawa-timur/lokalisasi-balong-cangkring-resmi-ditutup>, diakses tanggal 23 Juni 2016.

